

**2020
2024**



BADAN PUSAT STATISTIK



RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL

**DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL**

**2020
2024**



RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL

**DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL**

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL 2020-2024

No. Publikasi : 04310.2002
Katalog BPS : 1201023
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25.7 cm
Jumlah Halaman : x + 49

Naskah:
Deputi Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:
Deputi Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik - Indonesia

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi Renstra BPS Tahun 2020-2024. Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, serta ketahanan sosial, khususnya dari akurasi data yang dihasilkan dan kecepatan penyajian data.

Semua staf di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) dengan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, Seksi Badan Pusat Statistik.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan visi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial “**Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju**”. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2020
Deputi Bidang Statistik Sosial



Margo Yuwono

Ringkasan Eksekutif

Salah Satu Tugas Kedeputan Bidang Statistik Sosial BPS adalah menyediakan data dan informasi statistik sosial yang meliputi data kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial. Dalam melaksanakan kegiatannya, Kedeputan Bidang Statistik Sosial melakukan pengumpulan data berupa sensus dan survei. Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi BPS yaitu sebagai **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** Kedeputan Bidang Statistik Sosial BPS dituntut untuk menyediakan data statistik kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2020-2024. Renstra ini digunakan sebagai panduan tugas pokok dan fungsi kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi tersebut.

Dalam menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, Deputi Bidang Statistik Sosial menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial dalam menyediakan data statistik sosial yang berkualitas. Upaya-upaya ini tidak terlepas dari 3 (tiga) tujuan strategis BPS yaitu meningkatnya pemanfaatan data Statistik yang berkualitas, penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional dan Penguatan statistik sektoral K/L/D/I dalam kerangka tata Kelola kelembagaan.

Penjabaran tujuan Renstra Deputi Bidang Sosial dilakukan dengan Penyediaan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), serta Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sosial yang berkualitas.

2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional
3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diwadahi dalam sebuah program teknis yaitu **“Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)”** dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial 2020-2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Kedeputian Sosial untuk mewujudkan visi **“Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II – VISI, MISI, DAN TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL	
2.1. Visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	15
2.2. Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	15
2.3. Tujuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial	16
2.4. Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Statistik Sosial	17
BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik.....	21
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	22
3.3. Kerangka Regulasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	31
BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL	
4.1. Target Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial	35
4.2. Kerangka Pendanaan Kedeputian Bidang Statistik Sosial	37
BAB V – PENUTUP	
5.1. Penutup	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2019 Terhadap Target Renstra 2018 dan 2019, Menurut Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	4
Tabel 1.2 Persentase Lima Jenis Data yang Paling Banyak Dicari dari Penyedia Data BPS Pusat Menurut Ragam Data	5
Tabel 2-1 Pernyataan Visi dan Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	16
Tabel 2-2 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	16
Tabel 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	17
Tabel 3-1 Program dan Kegiatan Kedeputian Bidang Statistik Sosial	25
Tabel 4-1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Terget Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial	35
Tabel 4-3 Indikator Kebutuhan Pendanaan Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	38

2020
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Statistik Sosial mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024. Dalam menjalankan tugas, ke deputian bidang statistik sosial diharapkan dapat mencapai tujuan jangka panjang BPS sekaligus mencapai tujuan Nasional. Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pencapaian Umum Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2017-2019

Guna mengukur kemajuan capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2019 terhadap renstra 2018 dan 2019, diperlukan perbandingan realisasi terhadap target renstra. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, pengukuran capaian kinerja terhadap renstra dihitung berdasarkan perbandingan realisasi 2019 terhadap target renstra 2018 dan target renstra 2019 yang dinyatakan dalam persen pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator kinerja. Sekitar 83,33 persen (10 dari 12) dari jumlah seluruh indikator kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2019 melampaui target renstra tahun 2018 dan 2019. Terdapat dua indikator kinerja yang tidak mencapai target renstra 2018 maupun 2019. Indikator tersebut adalah jumlah publikasi/laporan statistik bidang sosial yang terbit tepat waktu, dan jumlah publikasi/laporan statistik bidang sosial yang memiliki ISSN/ISBN. Kedua indikator tersebut saling berkaitan karena publikasi/laporan yang memiliki nomor ISBN/ISSN berkaitan dengan terbitnya suatu publikasi tersebut. Untuk indikator persentase pemasukan dokumen (*respon rate*) survei Bidang Statistik Sosial untuk tahun 2019 nilainya melebihi target renstra sedangkan untuk tahun 2018 capaiannya tidak mencapai target renstra.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Kedeputan Bidang Statistik Sosial Tahun 2019 Terhadap Target Renstra 2018 dan 2019, Menurut Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran/Tujuan/ Indikator	Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja terhadap Renstra (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data Statistik Bidang Sosial									
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik Bidang Sosial	80	80	80	96,67	98,17	97,59	120,84	122,71	121,99
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data Statistik Bidang Sosial.	80	80	80	96,68	95,07	97,41	120,84	118,84	121,76
Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data Statistik Bidang Sosial	80	80	80	97,16	96,79	97,62	121,45	120,99	122,03
Persentase konsumen yang merasa puas dengan ketepatan waktu data Statistik Bidang Sosial.	80	80	80	96,18	96,12	98,65	120,84	120,15	123,31
Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	8	7	7	9	10	9	150,00	142,86	128,57
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Bidang Sosial yang terbit tepat waktu	46	78	77	46	50	48	59,74	64,10	62,34
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Bidang Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	44	76	76	41	43	42	53,95	56,58	55,26
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	0	1	1	0	1	9	0,00	100,00	900,00
Jumlah Release data Statistik Bidang Sosial yang tepat waktu.	4	4	4	10	6	10	250,00	150,00	250,00
Persentase pemasukan	98	98	98	99,01	93,90	99,50	100,00	95,82	101,53

Sasaran/Tujuan/ Indikator	Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja terhadap Renstra (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
dokumen (<i>response rate</i>) survei Bidang Sosial									
Jumlah Instansi Pemerintah dan swasta yang menerima publikasi BPS	33	59	33	140	152	40	424,24	257,63	121,21
Jumlah aktivitas statistik sosial metadatanya terdapat pada SiRusa	14	16	15	21	26	24	140,00	162,50	160,00

1.1.2. Aspirasi Masyarakat

Statistik sosial merupakan ragam data yang paling banyak dicari konsumen, yaitu 38,83 persen dari total pencarian data di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pusat. Dari seluruh pencarian ragam data statistik sosial, 29,47 persen memperoleh data sesuai dengan yang dicari; 1,30 persen berhasil memperoleh data yang dicari namun tidak sesuai dengan yang diinginkan; 8,54 persen tidak berhasil memperoleh data yang dicari; dan 60,68 persen belum memperoleh data yang dicari.

Pencapaian visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial hingga tahun 2019 dapat dilihat dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2019. Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah berusaha memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami. Berdasarkan publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2019, diketahui bahwa ragam data yang paling banyak dicari konsumen BPS Pusat adalah data statistik sosial. Selain itu, diketahui bahwa jenis data yang paling banyak dicari untuk ragam statistik sosial adalah data kependudukan (sebesar 40,83 persen), kemudian diikuti data ketenagakerjaan (sebesar 16,43 persen).

Tabel 1.2 Persentase Lima Jenis Data yang Paling Banyak Dicari dari Penyedia Data BPS Pusat Menurut Ragam Data

Ragam Data	Jenis Data yang Paling Banyak Dicari	
	Deskripsi	Persentase
Statistik Sosial	Kependudukan	40,83
	Ketenagakerjaan	16,43
	Kemiskinan	13,07
	Pendidikan	6,11
	Konsumsi Penduduk	5,41

Sumber: Survei Kebutuhan Data 2019

Gambar 1. Jenis data mikro yang paling Banyak Diperoleh dari pengguna data di BPS



Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, untuk data mikro yang paling banyak diperoleh dari penyedia data BPS Pusat adalah Data Mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan untuk sumber data yang dalam bentuk publikasi adalah Publikasi Statistik Indonesia (Gambar 1).

1.1.3. Inovasi Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2015-2019

Quick Wins Kedeputan Bidang Statistik Sosial tahun 2019

Quick Wins merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) ke dalam bentuk kegiatan prioritas dan program nasional. Sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Statistik Sosial serta membangun statistik sosial yang berkualitas dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0, maka ditetapkan *Quick Wins* Kedeputan Bidang Statistik Sosial. *Quick Wins* Kedeputan Bidang Statistik Sosial Tahun 2018 fokus pada tujuh area perubahan yang disusun dengan pertimbangan kemudahan untuk diimplemetasikan dan memiliki dampak yang besar bagi perbaikan statistik sosial. Adapun 7 *Quick Wins* Kedeputan Bidang Statistik Sosial terdiri dari:

1. *Data Revolution* dan *Big Data*,
2. Pemenuhan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs),
3. *Small Area Estimation* (SAE),
4. Penguatan data PODES (data spasial),
5. *Disaster Statistics*,
6. Implementasi *Quality Assurance Framework* (QAF),
7. Integrasi Statistik Sosial.

Perkembangan teknologi yang mengarah pada peningkatan volume dan jenis data yang tersedia sejalan dengan meningkatnya permintaan beragam data dari berbagai pihak. Berbagai penyedia data, mulai dari perusahaan, peneliti, hingga pihak pemerintah, tidak terkecuali BPS turut melakukan inovasi untuk dapat beradaptasi dengan dunia data baru yang lebih besar, lebih luas, lebih cepat, dan lebih terperinci daripada yang sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan dimasukkannya *Data Revolution* dan *Big Data* sebagai *Quick Wins 1* dari *Quick Wins* Kedeputan Bidang Statistik Sosial.

Pada prinsipnya keberadaan *Big Data* tidak dapat menggantikan peran data statistik resmi secara sepenuhnya, dikarenakan beberapa kelemahan yaitu datanya tidak terstruktur, menyebar, dan tanpa filter. Walau demikian *Big Data* dapat diolah dan dianalisis untuk proses pengambilan keputusan dalam *real time*. *Big Data* dapat dikolaborasikan dengan data statistik resmi, sehingga kedua data tersebut saling melengkapi. Pencapaian *Quick Wins 1* dapat dilihat pada pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020. Pelaksanaan SP 2020 dilakukan dengan berbagai inovasi yang belum pernah dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya. Salah satu inovasinya adalah di bidang metodologi sensus, dimana selama beberapa dekade menggunakan metode tradisional, akan beralih ke metode kombinasi (*combined method*) melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk kepentingan sensus sesuai dengan rekomendasi PBB yang menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (*full canvassing*) menuju ke *register based census*. Tujuan besar SP 2020 nantinya akan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".

Big Data juga dimanfaatkan pada penguatan di Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Pemanfaatan pencari mesin Google untuk mencari fenomena seperti informasi pabrik yang telah tutup atau banyak pemecatan pegawai untuk pendukung digunakan hasil Sakernas. Demikian juga didalam menghasilkan statistik komuter, dengan menggunakan *Mobile Position Data* (MPD). MPD merupakan suatu data mengenai informasi lokasi dari pengguna jaringan operator seluler (*subscriber*). Dengan MPD, informasi lokasi dari subscriber antarwaktu dapat diolah untuk memperoleh pola pergerakan atau mobilitas penduduk.

Disamping memenuhi kebutuhan data dari berbagai pengguna data, BPS juga turut serta menghasilkan indikator yang dijadikan tolok ukur pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Saat ini, BPS berkontribusi terhadap dihasilkannya 136 indikator SDGs Indonesia. Dari jumlah ini, 97 indikator diantaranya

dihasilkan BPS secara mandiri sedangkan 39 indikator lainnya diperoleh melalui kerjasama BPS dengan Kementerian/Lembaga. Kedeputian Statistik Sosial yang merupakan salah satu “produsen” indikator SDGs di BPS memandang pemenuhan indikator SDGs sebagai salah satu prioritas utama sehingga menjadikan hal tersebut sebagai *Quick Wins 2* di Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

Melalui Kedeputian Bidang Statistik Sosial, BPS menyediakan data dan informasi terkait Indikator SDGs baik melalui survei-survei secara rutin dilakukan oleh BPS seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial ekonomi Nasional (SUSENAS) maupun melalui kolaborasi dan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga dalam penyediaan data SDGs. Dalam rangka mewujudkan motto SDGs yaitu “*leaving no one behind*”, BPS berusaha menghasilkan indikator dengan berbagai level penyajian, mulai dari tipe daerah, jenis kelamin, kelompok umur, tingkatan wilayah yang lebih kecil, dsb. Kebutuhan akan data pada level yang lebih kecil ini seringkali tidak didukung dengan kecukupan jumlah sampel. Berkaca dari hal tersebut, BPS termasuk Kedeputian Bidang Statistik Sosial mulai menjajaki kemungkinan penerapan *Small Area Estimation* (SAE) dalam menghasilkan indikator-indikator statistik.

Pencapaian Penyusunan indikator SDGs yang dituntut sampai dengan tingkat kabupaten, sangat sulit dipenuhi. Ini karena diperlukan sampel yang lebih banyak dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan model SAE untuk indikator-indikator SDGs. Namun demikian sumber daya manusia (SDM) di BPS yang dapat menyusun model tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, pencapain *Quick Wins 3*, BPS melalui Sekretariat SDGs telah berinisiatif melakukan pelatihan penyusunan model SAE dalam beberapa gelombang untuk semua *Subject Matter* (SM) yang bertanggung jawab menyusun indikator SDGs.

Selanjutnya, upaya BPS untuk menyajikan data pada level wilayah yang lebih kecil sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang patut mendapat perhatian adalah meskipun titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, secara esensi kemandirian daerah harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Untuk mendukung hal tersebut, BPS berusaha menyediakan data pada level desa melalui pengumpulan data Potensi Desa (Podes). Melalui pengumpulan data ini, Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah memperkuat data spasial (*Quick Wins 4* Kedeputian Bidang Statistik Sosial)

Beberapa pencapaian dari penguatan data Podes adalah tersusunnya Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang digunakan sebagai alokator dana desa dan penyusunan Indeks Pembangunan Desa (IPD) atau Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipergunakan untuk melihat perkembangan pembangunan suatu desa. Mulai tahun 2019, BPS menyelenggarakan pemutahiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*), dan akan dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian penguatan data spasial.

Disaster Statistics merupakan tema penting lainnya yang diangkat sebagai satu dari 7 *Quick Wins* di lingkungan Kedeputan Bidang Statistik Sosial. Posisi Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana. Belum lagi posisi Indonesia yang juga terletak pada jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang dikenal dengan *Pasific Ring of Fire*. Berada di negara yang rawan bencana mendesak BPS untuk turut serta menyediakan data terkait bencana. Dengan tersedianya *disaster statistics*, diharapkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga baik nasional maupun internasional dapat memahami dampak dan kerugian akibat bencana sehingga aksi penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

Terjadinya bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2019 serta pendataan penduduk di daerah bencana yang dilakukan oleh banyak Kementrian/Lembaga secara terpisah menjadi salah satu pencapaian *Quick Wins* 5 di Kedeputan Bidang Sosial. Sesuai dengan kebijakan "*One Data*" telah dibangun sistim pendataan yang dilakukan BPS berintegrasi dengan beberapa kementrian. Dengan menerapkan kebijakan "Satu Data Bencana Indonesia", data kebencanaan yang dikumpulkan secara lengkap, dan dapat dipergunakan bagi para pengambil kebijakan.

Beragamnya produk statistik untuk memenuhi berbagai kepentingan ini pada akhirnya bermuara pada satu keputusan penting, yaitu BPS harus menjaga kualitas data mulai dari hulu hingga ke hilir. Kedeputan Bidang Sosial telah menangkap hal ini dan menuangkannya dalam bentuk *Quick Wins* 6 yaitu implementasi *Quality Assurance Framework* (QAF) pada setiap survei di bidang sosial. Pengukuran kualitas pada setiap tahapan kegiatan statistik dilakukan untuk memastikan *output* setiap tahapan sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Selain bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi BPS, hasil pengukuran kualitas juga dapat memberikan informasi bagi pengguna data dalam mengetahui kualitas data statistik yang mereka konsumsi.

Salah satu pencapaian *Quick Wins* 6 ini ditandai dengan pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) pada kegiatan Sensus Penduduk Online SP 2020. PK pada SP 2020 ini

mendapat dukungan dari *Australian Bureau Statistics* (ABS) dalam bentuk pendampingan serta masukan terkait rancangan implementasi *Quality Assurance Framework* dalam SP 2020. Sedangkan pada pelaksanaan Sakernas Februari 2019, Kedepatian Bidang Statistik Sosial, melalui Direktorat Statistik Ketenagakerjaan mulai melaksanakan uji coba *Quality Gate* (QG) di beberapa wilayah. Dari hasil uji coba tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bahwa semua prosedur penjaminan kualitas sudah dilakukan akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.

Beragam data yang dihasilkan oleh BPS tidak selalu harus berbanding lurus dengan jumlah survei yang dilakukan. Dengan melakukan *specify needs* indikator-indikator yang ingin dihasilkan dan dengan mempertimbangkan sisi metodologi, integrasi survei bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Pada tahun 2018, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan telah berhasil melakukan terobosan besar dalam melakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018. Dengan berkaca pada keberhasilan integrasi tersebut, integrasi survei berbasis rumah tangga di kalangan intern Kedepatian Bidang Statistik Sosial sangat mungkin untuk dilakukan (*Quick Wins* 7 Kedepatian Bidang Statistik Sosial).

Susenas merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs). Sementara itu Sakernas merupakan sumber utama untuk informasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga kedua survei ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan Indonesia.

Inisiasi Integrasi Statistik Sosial dilakukan di lingkungan Kedepatian Bidang Statistik Sosial melalui Sakernas Februari dan Agustus serta Susenas Maret dan September. Sementara itu, integrasi Sakernas dan Susenas masih dalam kajian.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Statistik Sosial didukung oleh sejumlah 178 sumber daya manusia (SDM) yang sebagian besar yaitu 49,86 persen berpendidikan DIV/S1 dan sebesar 42,02 persen berpendidikan S2. Berdasarkan data tersebut, kualitas SDM Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2019 tersebut cukup baik. Kualitas SDM Deputy Bidang Statistik Sosial minimal berpendidikan SMA dengan persentase sebesar 5,04 persen.

Deputy Bidang Statistik Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegiatan prioritas diselenggarakan Deputy Bidang Statistik Sosial guna menghasilkan berbagai data Statistik Sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputy Bidang Statistik Sosial mampu menghasilkan berbagai ukuran maupun indikator di Statistik Sosial yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Kelengkapan beragam data Statistik Sosial selama ini telah mampu memberikan andil penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Selanjutnya seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Deputy Bidang Statistik Sosial juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data. Dengan demikian data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*).

1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi

Berbagai tantangan yang muncul pada berbagai tahap kegiatan Statistik Sosial yang dilaksanakan harus dapat diatasi guna mewujudkan data berkualitas. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data bidang statistik sosial yang dihasilkan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan akomodasi terhadap indikator sektoral mungkin berakibat pada beban muatan variabel suatu survei, untuk itu perlu ditingkatkan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tantangan lainnya adalah mulai meningkatnya keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Statistik Sosial. Hal ini dapat menjadi kendala untuk memperoleh data yang berkualitas. Di sinilah diperlukan kegiatan sosialisasi, koordinasi yang terus menerus

dilakukan terhadap responden yang dapat menghasilkan hubungan yang baik dengan sumber data yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas data tersebut.

2020
2024

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL

- 2.1 VISI KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL**
- 2.2 MISI KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL**
- 2.3 TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL**
- 2.4 SASARAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL**

2.1. Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial dibangun untuk mendukung visi BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024 sebagai “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Pembangunan nasional di bidang statistik sosial diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan yang berkembang, seperti dukungan dan kerja nyata demi terwujudnya satu data kependudukan di Indonesia, reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, tuntutan tersedianya data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta penyelenggaraan kegiatan statistik dengan kondisi mobilisasi penduduk yang semakin meningkat.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial adalah **“Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”**.

2.2. Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Untuk mencapai visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial, maka ditetapkan misi yang menggambarkan kegiatan perstatistikan yang harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Kedeputan Bidang Statistik Sosial yang diselaraskan dengan Misi Badan Pusat Statistik. Rincian Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional,
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Tabel 2.1 Pernyataan Visi dan Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2020-2024	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial
		Misi 1: Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		Misi 2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		Misi 3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

2.3. Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Tujuan yang ditetapkan oleh Kedeputan Bidang Statistik Sosial mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial juga mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2020-2024. Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2020-2024	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedeputan Statistik Sosial 2020-2024
		Misi 1: Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		Misi 2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
Tujuan	1. Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Misi 3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
	2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	
	3. Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	

1. Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1: Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), terkait dengan:
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional, terkait dengan:
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

2.4. Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kedeputian Bidang Statistik Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan pada Kedeputian Bidang Statistik Sosial ini. Adapun tujuan, sasaran strategis, dirumuskan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis di Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Tujuan	Sasaran Strategis
Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sosial yang berkualitas
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Menguatnya Komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)
Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sosial yang berkualitas. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pertama, yaitu menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Sasaran Strategis 2: Menguatnya Komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN). Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan yang kedua, yaitu meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Sasaran Strategis 3: Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan yang ketiga, yaitu meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

2020
2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PUSAT
STATISTIK**

**3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN
BIDANG STATISTIK SOSIAL**

**3.3 KERANGKA REGULASI KEDEPUTIAN BIDANG
STATISTIK SOSIAL**

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020 - 2024 yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024 mengamanatkan bahwa arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan.

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan ini antara lain :

- a. Meningkatkan akurasi data melalui integrasi proses bisnis serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas
- b. Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data, penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan
- c. Melakukan Risk Manajement di setiap kegiatan statistik
- d. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standard international
- e. Meningkatkan cakupan estimasi dasar dengan penerapan *Small Area Estimation* (SAE)
- f. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral
- h. Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi international di Indonesia

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan ini antara lain :

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c. Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN
Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan ini antara lain :
 - a. Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)
 - b. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
 - c. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN
 - d. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
 - e. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Arah dan kebijakan strategi Kedeputan Bidang Statistik Sosial dalam penyediaan data dan informasi statistik merupakan turunan dari arah dan kebijakan strategi BPS yang termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024.

3.2.1. Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan Strategi Kedeputan Bidang Statistik Sosial berfokus pada 3 (tiga) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh BPS yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik Sosial untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik sosial
- b. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar
- c. Penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial

- b. Memastikan kemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi
 - c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus
 - d. Mengembangkan penerapan SAE dalam penyediaan data statistik sosial
 - e. Menerapkan Big Data dalam penyediaan data statistik sosial
 - f. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui *National Quality Assurance Framework* (NQAF)
 - g. Memastikan penggunaan standard dan metodologi data statistik sosial di Indonesia
 - h. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat internasional
 - i. Menugaskan statistisi dalam pelaksanaan kegiatan survei/sensus
2. Meningkatnya kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN
- Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN melalui pembinaan kepada pegawai terkait Satu Data Indonesia (SDI).
 - b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang statistik sosial.
 - c. Memaksimalkan peran BPS khususnya Deputy Bidang Statistik Sosial untuk Satu Data Indonesia (SDI). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, Satu Data Bencana, Satu Data Ketenagakerjaan, Satu Data Kependudukan, dan Satu Data Kriminal.
3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN
- Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Penguatan implementasi SSN
- b. Penyediaan statistik sektoral

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik
- b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I
- c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik sosial. Saat ini sudah banyak K/L/D/I yang mendapatkan asistensi dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
T1. Menyediakan data statistik sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas	AK.1. Peningkatan kualitas data statistik sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akurasi data 2. Memastikan kemutakhiran data 3. Melakukan perbaikan metodologi untuk meningkatkan kualitas data 4. Mengembangkan penerapan <i>Small Area Estimation (SAE)</i> dalam penyediaan data statistik sosial 5. Menerapkan <i>Big Data</i> dalam penyediaan data statistik sosial 	PPIS	Penyediaan dan Pengembangan data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Demografi 2. Statistik Ketenagakerjaan 3. Statistik Upah dan Pendapatan 4. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 5. Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 6. Statistik Rumah Tangga 7. Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial 8. Statistik Kesehatan dan Perumahan 9. Statistik Ketahanan Wilayah 10. Statistik Lingkungan Hidup 11. Statistik Politik dan Keamanan 12. Statistik Kerawanan Sosial
		AK.2. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui NQAF 7. Memastikan penggunaan standar-standard dan 		

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>metodologi internasional</p> <p>8. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat Internasional</p> <p>9. Menugaskan Statistisi dalam Pelaksanaan kegiatan sensus/survei</p>		
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	SS.2. Menguatnya komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN) di Bidang Statistik Sosial	AK. 3. Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	<p>10. Capacity Building kepada pegawai tentang SDI</p> <p>11. Menugaskan Statistisi untuk memperkuat statistik sektoral</p> <p>12. Memaksimalkan peran BPS untuk Satu Data Indonesia (SDI)</p>		
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	SS.3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I di Bidang Statistik Sosial	AK.4. Penguatan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN)	<p>13. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik</p> <p>14. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I</p> <p>15. Melakukan koordinasi dengan</p>		

Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
		AK.5. Penyediaan statistik sektoral	kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial 16. Memberikan <i>Technical Assistance</i> pada beberapa K/L//D/I untuk kegiatan statistik		

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024, Deputi Bidang Statistik Sosial mendukung arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020 – 2024 antara lain:

a. Data Perencanaan Pembangunan

Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah menghasilkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, diantaranya data-data strategis dan tujuan pembangunan.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Kedeputian Bidang Statistik Sosial berkomitmen dalam pelaksanaan target TPB dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap indikator statistik sosial. Selain sebagai penyedia data, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam mengawal K/L lain dalam penyediaan indikator TPB.

c. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik sosial. Strategi yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial antara lain:

- I. Menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- II. Memasukan perspektif gender dalam survei yang dilakukan.
- III. Memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik.
- IV. Memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke kuliah/sekolah, kursus, dan pelatihan.

d. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Salah satu survei di Bidang Statistik Sosial terkait modal sosial budaya yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan merujuk pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2009 dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

e. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Aspek pemanfaatan teknologi komputasi dilakukan dalam kegiatan statistik seperti big data dan *mobile computing*.

f. Statistik Kebahagiaan

Selain menghasilkan indikator statistik obyektif, Kedeputian bidang Statistik Sosial juga menghasilkan statistik subyektif yang menjadi pelengkap dari statistik lainnya yaitu statistik kebahagiaan. Survei terkait statistik kebahagiaan yaitu Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang sudah dilaksanakan dua kali yaitu tahun 2014 dan 2017. Survei ini akan dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

3.2.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijalankan di lingkungan Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang mencakup pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, Kedeputian Bidang Statistik Sosial secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan serta pengkajian data dan informasi statistik sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi beberapa komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon II (direktorat) di lingkungan Kedeputian Bidang Statistik Sosial dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kegiatan di Kedeputian Bidang Statistik Sosial yang sesuai dengan Program Penyediaan dan Pelayanan Statistik (PPIS) antara lain:

1. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Demografi
2. Penyediaan dan pengembangan data Statistik ketenagakerjaan

3. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Upah dan Pendapatan
4. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja
5. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Rumah Tangga
6. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
7. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Kesehatan dan Perumahan
8. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Ketahanan Wilayah
9. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Lingkungan Hidup
10. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Politik dan Keamanan
11. Penyediaan dan pengembangan data Statistik Kerawanan Sosial

3.2.3. Prioritas Nasional

Terdapat 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional (PN) periode tahun 2020 – 2024. Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki kegiatan penyediaan data statistik yang mendukung PN tersebut diantaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)
Pelaksanaan SP2020 mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN yang berkaitan dengan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.
2. Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Pelaksanaan Sakernas mendukung PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Pelaksanaan Susenas mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
4. Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes)
Pelaksanaan Pendataan Podes mendukung PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah.
5. Penyusunan Statistik Keamanan
Pelaksanaan penyusunan statistik keamanan mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
6. Pelaksanaan Survei Prilaku Anti Korupsi (SPAK)
Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

7. Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

3.3. Kerangka Regulasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Kedeputian Bidang Statistik Sosial memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang statistik sosial yang berkaitan dengan kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial.

Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu kedeputian teknis dalam lingkup satuan organisasi BPS, secara umum regulasi yang mengatur kegiatan di Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah sama dengan regulasi yang mengatur kegiatan di BPS yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi Kedeputian Bidang Statistik Sosial khusus terkait hal yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan statistik :

- a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Intisari dari regulasi:
 - Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus,
 - Mengatur entitas yang dasar, sektoral, dan khusus,
 - Melakukan penyelenggaraan statistic.
- b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Intisari dari regulasi:
 - Berisikan penjelasan sektoral, dan khusus, teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar,
 - Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
 - Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistic,
 - Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

- c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah. Intisari dari regulasi:
- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektorial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
 - Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektorial
1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
 2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107).
- d. Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI)
- Perpres tersebut menerangkan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi.

Meskipun telah ada regulasi sebagai payung hukum sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan statistik terutama penyediaan data statistik sosial, masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Masih terdapat responden yang tidak bersedia diwawancarai dalam kegiatan survei.
- b. Masih terdapat pengumpulan data sektorial yang dilakukan oleh BPS, yang seharusnya dapat dilakukan oleh K/L/D/I.
- c. Masih terdapat hasil statistik sektorial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang belum diserahkan kepada BPS.
- d. Masih terdapat hasil statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat

4.1. Target Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja menjelaskan tentang hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Statistik Sosial tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, Deputy Bidang Statistik Sosial menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang mencerminkan hasil dari program dan kegiatan Deputy Bidang Statistik Sosial. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kedeputian Bidang Statistik Sosial**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Menyediakan data Statistik Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas	Jumlah indikator statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	147	157	177	167	166
		Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	114	114	114	114	114
		Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	62	65	67	68	69
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional						

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Menguatnya Komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah K/L/D/I yang telah menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN)	13	16	17	18	21
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam pembinaan Statistik Sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	Jumlah K/L/D/I yang mendapat <i>technical assistance</i> Statistik Sosial	34	45	47	51	53

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020-2024, Deputi Bidang Statistik Sosial menjalankan 1 (satu) program PPIS dan **3 (tiga) kegiatan**. Adapun program dan kegiatan yang dijalankan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Sasaran yang ingin dicapai dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas**
Indikator Kinerja:
 - Jumlah indikator statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data
 - Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN
 - Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs

- 2. Sasaran: Menguatnya Komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)**
Indikator Kinerja Program: Jumlah K/L/D/I yang telah menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN).

- 3. Sasaran: Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I**
Indikator Kinerja: Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan *technical assistance* statistik sosial.

Sedangkan kegiatan yang dijalankan oleh Kedepuitan Bidang Statistik Sosial pada 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- (i) Kegiatan 2905: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
 - (a) 2905.005 publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan
 - (b) 2905.006 publikasi/laporan sensus penduduk
 - (c) 2905.008 publikasi/laporan survei kependudukan
 - (d) 2905.100 laporan pembinaan statistik sektoral
- (ii) Kegiatan 2906: penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat.
 - (a) 2906.003 publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu
 - (b) 2906.100 laporan pembinaan statistik sektoral
- (iii) Kegiatan 2907: penyediaan dan pengembangan statistik ketahanan sosial.
 - (a) 2907.006 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial
 - (b) 2907.007 publikasi penghitungan dan analisis kemiskinan makro
 - (c) 2907.008 publikasi/laporan pendataan podes
 - (d) 2907.100 laporan pembinaan statistik sektoral

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan disertai masing-masing *outcome/output* ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Output (IKO). Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*)

Indikator kinerja kegiatan dan Indikator Kinerja Output dari masing-masing program dan kegiatan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial dalam setiap direktorat dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran.

4.2. Kerangka Pendanaan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Deputi Bidang Statistik Sosial	4.441.418,56	1.770.362,58	604.355,81	542.224,63	723.301,73
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.441.418,56	1.770.362,58	604.355,81	542.224,63	723.301,73
KEGIATAN 2905: Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)	4.158.949,7	1.340.544,7	202.337,3	213.694,7	241.353,0
KEGIATAN 2906: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)	246.512,1	265.640,6	337.482,8	287.084,4	299.258,6
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)	35.956,8	164.177,3	64.535,7	41.445,6	182.690,1

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam Matriks Kinerja dan Alokasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

2020
2024

BAB V

PENUTUP

5.1 PENUTUP

5.1. Penutup

Rencana Strategis Deputy Bidang Statistik Sosial periode 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Deputy Bidang Statistik Sosial untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan BPS 2020-2024.

Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan BPS dalam mengisi pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang statistik sosial.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputy Bidang Statistik Sosial 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh staf Kedeputusan Bidang Statistik Sosial. Dengan dilandasi oleh semangat dan budaya kerja yang tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai budaya organisasi BPS yakni profesional, integritas dan amanah kiranya keinginan kuat untuk menyediakan data statistik sosial yang berkualitas dapat selalu terwujud dan akan memberikan dampak serta dukungan kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode 2020 – 2024.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya demi terwujudnya capaian kegiatan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan melalui Renstra ini.

2020
2024

LAMPIRAN

I. MATRIKS KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL

Lampiran Matriks Kinerja Dan Alokasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dln miliar rupiah)					Unit Organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program 06: PPIS Deputi Bidang Statistik Sosial						4.441,4	1.770,4	604,4	542,2	723,3		
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas										Deputi Bidang Statistik Sosial	
	Jumlah indikator statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	147	157	177	167	166						
	Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	114	114	114	114	114						
	Jumlah Indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	62	65	67	68	69						
	Menguatnya Komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)											
	Jumlah K/L/D/I yang telah menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN)	13	16	17	18	21						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah K/L/D/I yang mendapat <i>technical assistance</i> Statistik Sosial	34	45	47	51	53						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (d/m miliar rupiah)					Unit Organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2905: Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)						4.158,9	1.340,5	202,3	213,7	241,4		
	Tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas										Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	
	Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data	45	48	65	52	48						
	Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam RPJMN	14	14	14	14	14						
	Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs	39	40	40	40	40						
	Menguatnya statistik sektoral di K/L/D/I											
	Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan <i>technical assistance</i> oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	0	2	3	4	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (d/m miliar rupiah)					Unit Organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penguatan komitmen K/L/D/I terkait statistik kependudukan dan ketenagakerjaan terhadap SSN											
	Jumlah K/L/D/I yang menerapkan standar SSN, dimana Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ikut berperan sebagai pembina	0	1	1	1	1						
KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)							246,5	265,6	337,5	287,1	299,3	
	Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas											Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah indikator statistik kesra yang menyertakan informasi akurasi data (relatif standar error)	102	109	112	115	118						
	banyaknya indikator statistik kesra yang digunakan dalam RPJMN	94	94	94	94	94						
	Banyaknya indikator statistik kesra yang digunakan sebagai indikator SDGs	11	12	13	14	15						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dlm miliar rupiah)					Unit Organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I di bidang kesejahteraan rakyat terhadap Sistem Statistik Nasional											
	Jumlah K/L/D/I yang menerapkan standar SSN, dimana Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat ikut berperan sebagai pembina	0	1	2	3	4						
	Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I di Bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat											
	Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan <i>technical assistance</i> oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	0	9	12	15	18						
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)							36,0	164,2	64,5	41,4	182,7	
	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas											Statistik Ketahanan Sosial
	Jumlah konsumen yang menggunakan publikasi statistik Ketahanan Sosial	86.695	86.750	86.801	86.860	86.915						
	Jumlah Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	6	6	6	6	6						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dln miliar rupiah)					Unit Organisasi pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	12	13	14	14	14						
	Penguatan Komitmen K/L/D/I											
	Jumlah K/L/D/I yang telah menerapkan standar Sistem Statistik Nasional (SSN)	13	14	14	14	16						
	Menguatnya Statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah eselon II di K/L/D/I yang mendapatkan technical assistance dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	35	39	40	43	44						

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta, 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-1, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id